

Catatan Tahun 2021, Program Unggulan Bupati Bengkalis RoRo 24 jam Tak Seperti Diharapkan

Yulistar - BENGKALIS.PUBLIKRIAUI.COM

Jan 1, 2022 - 18:23



Antrian kendaraan roda empat di pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis

BENGKALIS - Setelah dilantik pada bulan Februari 2021 Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Bagus Santosa langsung merealisasikan 8 program unggulan yang disampaikan pada saat kampanye Pilkada Kabupaten Bengkalis

2020 lalu. Salah satunya program unggulan yang adalah dengan melaunching penyebrangan Ro-ro Air Putih ke dari Sei Selari beroperasi 24 jam.

Tapi apa daya bukan kelancaran dan kenyamanan pengguna jasa pelayaran kapal Roro di tapi semakin semrawut atau warga harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk ke kapal tapi disaat antrian panjang masih ada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi dengan menerobos antrian.

Disini permasalahan tidak hanya pihak operator kapal juga kondisi dermaga baik di pelabuhan Roro Sei selari dan Air Putih yang hanya dua dermaga yang mempunyai penyakit berbeda.

Baca juga:

<https://bengkalis.indonesiasatu.co.id/antrian-di-pelabuhan-ro-ro-air-putih-bengkalis-padat-dishub-akan-buka-posko-libur-nataru>

Sebelumnya Plt Kadis Perhubungan Jamaluddin, mengatakan pengolahan pelabuhan di Bengkalis akan dikelola oleh BUMD dengan membentuk anak usaha berupa Badan Usaha Pelabuhan Daerah (BUPD) Bengkalis. "Dinas Perhubungan Anggaran tahun 2022 akan rencanakan rehap dermaga I dan pengerukan dermaga II juga akan melakukan studi kelayakan bangun dermaga III dan akan di bentuk BUPD Pemkab Bengkalis dan DPRD segera mengaktifkan BUMD dan ini diusahakan tahun depan sudah mulai dijejali," kata Jamaluddin berapa saat lalu.

Akhirnya penggunaan jasa penyebrangan Ro-ro harus tetap berharap cemas apabila antrian panjang harus menunggu lama dan apabila ada keberuntungan sepi maka bisa langsung naik ke kapal Roro. Dihubungkan dengan janji Bupati Bengkalis RoRo 24 jam tidak relevan dengan kenyataan di lapangan.

Kapolres Rasa Sekda Bengkalis

Akhirnya kabupaten Bengkalis bisa tembus melaksanakan vaksinasi Covid-19 dosis pertama dengan capaian diatas 70 persen. Sebelumnya kabupaten Bengkalis masuk dalam kelompok daerah yang dibawah 70 persen dosis pertama dan dibawa 60 persen capai vaksinasi untuk Lansia.

Siapa yang bergerak yang mengajak masyarakat semua golongan agar mau di vaksin dari pandangan dan pengamatan wartawan di Bengkalis adalah Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan. Dengan mengintruksikan jajarannya sampai ke tingkat Bhabinkamtibmas untuk mengecek satu persatu warga apa sudah vaksinasi Covid-19 atau tidak kalau belum lansung dibawah ke tempat vaksinasi dan apabila sudah manula atau Lansia langsung di datangi untuk di vaksin.

Hal seperti ini bukan saja dari kepolisian juga pihak TNI semua jajaran kodim 0303 sampai ke Babinsa mengecek tiap-tiap warga agar mau divaksin. Selain itu peran relawan yang secara sukarela membantu proses vaksinasi Covid-19. Mereka bukan hanya memberikan waktu dan tenaga juga materi dari pernyataan koordinator Relawan Peduli Covid-19 Kabupaten, Huang Ik Cen, mereka sudah menghabiskan Rp. 700 juta membantu mensukseskan vaksinasi Covid-19 di Bengkalis.



Kapolres Bengkalis mengatakan pada saat wartawan meminta keterangan perkembangan percepatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bengkalis," Saya merasa seperti Sekda Bengkalis karena setiap ada rapat dengan Satgas Covid-19 Kabupaten Bengkalis sering menjadi acuan atau tempat bertanya dan kita harapkan semua pihak yang terlibat dalam percepatan vaksinasi bersama-sama mengejar target pencapaian vaksinasi," kata Hendra Gunawan.

Baca juga:

<https://bengkalis.indonesiasatu.co.id/ujung-tombak-bhabin-upaya-polres-bengkalis-datangi-warga-di-pulau-terluar-mendapatkan-vaksinasi>

Dari data pencapaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bengkalis sudah Diatas 70 persen (74%) dan pencapaian vaksinasi Covid-19 golongan Lansia baru mencapai 54% ri target 60 persen sampai akhir tahun 2021.

Pokir Yang Diperebutkan

Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sepanjang tahun 2021, hampir dipastikan tidak ada memberikan sumbangsih bagi ke majuan atau membuat peraturan daerah yang memberikan peluang bagi masyarakat meningkat ekonomi atau secara khusus untuk pemasukan pendapat daerah. Di pemberitaan media hanya ngurusi pokok pikiran (Pokir) ini pun menjadi permasalahan saling mengkleim Pokir antar anggota DPRD.

Salah satu menjadi sorotan persoalan Pokir anggota dewan dari partai Nasdem dan partai Demokrat dalam satu dapil. Dan yang lucunya wakil rakyat ini merasa paling peduli terhadap warganya padahal dibelakang itu dalam mendapatkan Pokir tiap-tiap anggota DPRD Kabupaten Bengkalis mempunyai hak mengusulkan, di letakkan tiap-tiap OPD dan yang terakhir mengerjakan sendiri. Intinya merasa berbuat banyak terhadap masyarakat tapi ujung ujungnya mendapatkan untung sebanyak banyaknya.

Diharapkan anggota DPRD yang terhormat bekerja tetap sesuai SOP nya tidak melenceng kemana mana karena pemerintah yang bersih dan didukung masyarakat adalah mempunyai program pro rakyat dan bukan semua kegiatan hanya pencitraan untuk mempertahankan jabatan sebagai anggota DPRD.

Baca juga

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/10/26/buntut-masalah-pokir-partai-demokrat-didepak-dari-fraksi-suara-rakyat-dprd-bengkalis>

Sudah berjalan dia tahun pendemi covid-19 di Indonesia khususnya di kabupaten Bengkalis banyak permasalahan ditengah masyarakat yang belum bisa menjadi fokus pemerintah. Dinas kesehatan kabupaten Bengkalis lebih utamakan distribusi vaksin Covid-19 dan juga memberikan vaksinasi Covid-19 ke warga dengan mengaktifkan seluruh faskes yang ada.

ODGJ Bertambah Penanganan Seadanya

Salah satu yang kurang mendapat perhatian pemerintah adalah keberadaan Orang Dalam Gangguan Ji wa (ODGJ) atau sakit jiwa. Dari data di diskres Bengkalis menunjukkan ada 888 ODGJ yang didata dari 14 faskes yang ada di kabupaten Bengkalis.



Data yang dikeluarkan dari Kabid P2P Diskres Bengkalis yang mendapatkan perawatan hanya 11 ?ri jumlah ODGJ yang ada.

Baca juga:

<https://bengkalis.indonesiasatu.co.id/merubah-stigma-di-kabupaten-bengkalis-terdata-888-penderita-odgj>

Hampir dipastikan peran petugas puskesmas yang menangani penderita ODGJ berat hanya memberikan obat-obatan kalau sudah meresahkan baru di rujuk ke RSJ Pekanbaru.

Seharusnya pemerintah daerah bisa mencari penyebab mengapa ODGJ atau gangguan mental berat semakin banyak dan mengapa penanganan atau ODGJ mendapatkan perawatan medis hanya 11 persen.? (yulistar)